PERKEMBANGAN PERISTIWA KEMERDEKAAN DI NEGARA-NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA:STUDI KASUS 5 PENDIRI NEGARA ASEAN

Humaida[1], Rifana Mutia Sari[2], Rista Khaurani Fitri[3], Takia Ayesha[4], Rusdi[5]

[1,2,3,4,5]***Universitas Negeri Padang***
E-mail : humaidanst@gmail.com[1], rifanamutiasari@gmail.com[2], ristakhairanif@gmail.com[3], takia.12232005@gmail.com[4], rusdi64@fis.unp.ac.id[5]

ABSTRACT

The independence of Southeast Asian countries was the result of long struggles against colonialism, the impact of World War II, and the growth of nationalism in each country. Indonesia gained independence on August 17, 1945, after Japan's defeat and through important events such as the Rengasdengklok Incident and the Proclamation of Independence. Malaysia achieved independence diplomatically from Britain on August 31, 1957, through the role of UMNO and the leadership of Tunku Abdul Rahman. Singapore became an independent state on August 9, 1965, due to its political separation from the Federation of Malaysia. Thailand had a different historical experience because it successfully maintained its sovereignty from Western colonialism through modernization and diplomatic strategies. Meanwhile, the Philippines gained independence after a long struggle against Spain and the United States and was officially recognized as independent on July 4, 1946. The shared historical experiences of Southeast Asian countries later encouraged the establishment of ASEAN in 1967 as a regional organization aimed at creating stability, cooperation, and peace in Southeast Asia.

Keywords : *Independence, Southeast Asia, Nationalism, Colonialism, ASEAN.*

ABSTRAK

Kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara merupakan hasil dari perjuangan panjang melawan kolonialisme, pengaruh Perang Dunia II, serta berkembangnya nasionalisme di masing-masing negara. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang dan melalui perjuangan rakyat serta peristiwa penting seperti Rengasdengklok dan Proklamasi Kemerdekaan. Malaysia meraih kemerdekaan secara diplomatis dari Inggris pada 31 Agustus 1957 melalui peran UMNO dan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman. Singapura menjadi negara merdeka pada 9 Agustus 1965 akibat pemisahan politik dari Federasi Malaysia. Thailand memiliki sejarah yang berbeda karena mampu mempertahankan kedaulatannya dari kolonialisme Barat melalui modernisasi dan diplomasi kerajaan. Sementara itu, Filipina memperoleh kemerdekaan setelah perjuangan panjang melawan Spanyol dan Amerika Serikat hingga diakui merdeka pada 4 Juli 1946. Persamaan pengalaman sejarah negara-negara Asia Tenggara tersebut kemudian mendorong terbentuknya ASEAN pada tahun 1967 sebagai organisasi regional untuk menciptakan stabilitas, kerja sama, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci : *Kemerdekaan, Asia Tenggara, Nasionalisme, Kolonialisme, ASEAN.*

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan penjajahan dan proses pembentukan negara-negara merdeka. Sebagian besar negara di kawasan ini pernah mengalami kolonialisme bangsa Barat maupun pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II. Kondisi tersebut mendorong munculnya semangat nasionalisme dan perjuangan rakyat untuk memperoleh kemerdekaan. Setiap negara memiliki latar belakang dan proses kemerdekaan yang berbeda sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan sejarah kolonial yang dialaminya.

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina merupakan negara-negara yang memiliki peranan penting dalam perkembangan sejarah kawasan Asia Tenggara. Indonesia merdeka melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, Malaysia memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi dengan Inggris, Singapura merdeka setelah berpisah dari Federasi Malaysia, Thailand berhasil mempertahankan kedaulatannya tanpa dijajah secara langsung oleh bangsa Barat, sedangkan Filipina mengalami perjuangan panjang melawan kolonialisme Spanyol dan Amerika Serikat.

Setelah memperoleh kemerdekaan, negara-negara di Asia Tenggara menyadari pentingnya membangun kerja sama regional untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat hubungan antarnegara. Kesadaran tersebut melahirkan Association of Southeast Asian Nations pada tahun 1967 yang didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas perkembangan peristiwa kemerdekaan di lima negara pendiri ASEAN serta proses pembentukan ASEAN sebagai organisasi kerja sama regional di Asia Tenggara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji perkembangan peristiwa kemerdekaan di negara-negara kawasan Asia Tenggara, khususnya lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Fokus penelitian meliputi latar belakang kemerdekaan, proses perjuangan kemerdekaan, serta pembentukan Association of Southeast Asian Nations.

Sumber data diperoleh dari buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan penelitian mengikuti metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan negara-negara pendiri ASEAN. Selanjutnya, kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber yang digunakan. Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan proses kemerdekaan masing-masing negara serta kaitannya dengan pembentukan ASEAN. Tahap terakhir, yaitu historiografi, dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk tulisan ilmiah yang runtut dan mudah dipahami. Metode ini digunakan agar penelitian dapat memberikan pemahaman yang objektif mengenai perkembangan kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 setelah Belanda dikalahkan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapat sambutan cukup baik dari rakyat Indonesia karena membawa propaganda sebagai "saudara tua" bangsa Asia yang ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Jepang juga memperkenalkan slogan Gerakan Tiga A, yaitu "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia" untuk menarik simpati rakyat Indonesia (Kartodirdjo, 2008). Namun setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang menerapkan pemerintahan militer yang keras dan otoriter. Jepang memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga rakyat untuk mendukung kebutuhan perang di Asia Pasifik. Dalam bidang ekonomi, rakyat diwajibkan menyerahkan hasil panen kepada pemerintah Jepang sehingga banyak daerah mengalami kekurangan makanan dan kelaparan. Selain itu, masyarakat juga dipaksa mengikuti kerja paksa atau romusha untuk membangun sarana militer seperti jalan, rel kereta api, dan benteng pertahanan. Banyak romusha meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kelelahan (Kartodirdjo, 2008).

Di bidang sosial dan politik, Jepang membentuk organisasi seperti Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Jawa Hokokai, dan PETA. Walaupun organisasi tersebut dibentuk untuk kepentingan Jepang, keberadaannya secara tidak langsung memberikan pengalaman organisasi dan latihan militer bagi rakyat Indonesia. Organisasi PETA menjadi penting karena melahirkan banyak tokoh pejuang yang nantinya berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tekanan dan penderitaan rakyat selama masa pendudukan Jepang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap Jepang dan memicu berbagai perlawanan, salah satunya Pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi pada tahun 1945 (Kartodirdjo, 2008). Di sisi lain, pendudukan Jepang juga secara tidak langsung menumbuhkan semangat nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia, pembentukan organisasi, dan latihan militer bagi para pemuda Indonesia (Rut et al., 2024).

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi faktor penting yang membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Jepang mulai mengalami kekalahan setelah Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat melakukan serangan balasan di berbagai wilayah Asia dan Pasifik. Kondisi Jepang semakin memburuk ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 (Kartodirdjo, 2008). Kekalahan Jepang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan atau *vacuum of power* di Indonesia karena Jepang sudah kehilangan kekuasaannya sementara Sekutu belum tiba di Indonesia. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Nasionalisme Indonesia menjadi faktor utama yang mendorong rakyat memperjuangkan kemerdekaan. Semangat nasionalisme tumbuh sejak masa penjajahan Belanda melalui pendidikan, organisasi modern, pers, dan gerakan nasional. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan Partai Nasional Indonesia memiliki peran penting dalam membangkitkan rasa persatuan bangsa Indonesia (Kartodirdjo, 2008). Pada masa pendudukan Jepang, nasionalisme semakin berkembang melalui penggunaan bahasa Indonesia dan keterlibatan tokoh-tokoh Indonesia dalam organisasi bentukan Jepang. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan bangsa (Rut et al., 2024). Semangat

nasionalisme akhirnya mencapai puncaknya ketika Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proses kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena menjadi awal lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh sebagai hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Puncak perjuangan tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya kepada dunia internasional (Rinardi, 2017).

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk segera merdeka. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Golongan muda seperti Wikana, Sukarni, dan Chairul Saleh menginginkan kemerdekaan dilakukan secara mandiri, sedangkan golongan tua seperti Soekarno dan Mohammad Hatta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mempertimbangkan kondisi keamanan dan politik saat itu (Rinardi, 2017).

Perbedaan pendapat tersebut melahirkan Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, agar keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh Jepang. Setelah melalui berbagai diskusi, Ahmad Subardjo memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan teks proklamasi (Febrianti, 2024).

Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Subardjo menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Setelah konsep selesai dibuat oleh Soekarno dan mendapat masukan dari Hatta serta Ahmad Subardjo, teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Naskah proklamasi akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia (Rinardi, 2017).Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Soekarno didampingi Mohammad Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Setelah pembacaan proklamasi, bendera Merah Putih dikibarkan sebagai simbol lahirnya negara Indonesia merdeka. Proklamasi tersebut menjadi tanda berakhirnya penjajahan dan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Rinardi, 2017).

Meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Setelah proklamasi, Indonesia masih menghadapi ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dengan bantuan Sekutu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran dan diplomasi di berbagai daerah. Perjuangan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia benar-benar diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri (Febrianti, 2024).

Malaysia

Akar penjajahan di Tanah Melayu dapat ditelusuri sejak runtuhnya Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada 1511. Wilayah ini kemudian berpindah tangan ke kekuasaan Belanda pada 1641, sebelum akhirnya beralih ke Inggris setelah ditandatanganinya Perjanjian Anglo-Belanda tahun 1824. Di bawah kekuasaan kolonial Inggris, sistem administrasi diperluas secara masif melalui penguasaan ekonomi, birokrasi, dan politik di berbagai negeri Melayu. Meski perlawanan terhadap kolonialisme muncul dalam berbagai bentuk mulai dari gerakan Dol Said di Naning, Datuk Bahaman di Pahang, hingga Tok Janggut di Kelantan semua perlawanan tersebut masih

bersifat lokal dan belum terkonsolidasi dalam gerakan nasional yang terorganisasi secara luas (Hall, 1987).

Dorongan paling signifikan bagi lahirnya nasionalisme Melayu modern ialah penerapan kebijakan Malayan Union oleh Inggris pada 1946. Melalui sistem ini, Inggris berupaya menyatukan negeri-negeri Melayu, Pulau Pinang, dan Melaka di bawah satu administrasi terpusat. Namun kebijakan ini memantik penolakan yang luar biasa dari masyarakat Melayu karena dinilai mengancam posisi politik orang Melayu sekaligus melemahkan kedudukan Raja-raja Melayu sebagai simbol kedaulatan tradisional. Pemberian syarat kewarganegaraan yang longgar kepada masyarakat non-Melayu juga dilihat sebagai ancaman serius terhadap identitas bangsa Melayu di tanah leluhurnya sendiri (Simandjuntak, 1969).

Reaksi keras terhadap Malayan Union kemudian mendorong konsolidasi politik masyarakat Melayu melalui pendirian United Malays National Organisation (UMNO) pada 1946 di bawah kepemimpinan Dato' Onn Jaafar. UMNO menjadi wadah utama perjuangan politik dalam mempertahankan hak-hak tradisional, martabat Raja-raja Melayu, dan jati diri kebangsaan Melayu. Tekanan diplomatik dan gelombang protes yang dilancarkan UMNO akhirnya berhasil memaksa Inggris mencabut Malayan Union dan menggantinya dengan sistem Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 sebuah sistem yang secara signifikan lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal (Halimi, 2008).

Pendudukan Jepang antara 1941-1945 turut membawa perubahan struktural yang mendalam dalam masyarakat Tanah Melayu. Selain meruntuhkan mitos superioritas bangsa Eropa, pendudukan tersebut juga menyebarkan semangat "Asia untuk Orang Asia" yang secara tidak langsung menyuburkan bibit-bibit nasionalisme. Pasca-pendudukan, aktivitas Parti Komunis Malaya (PKM) yang semakin mengancam mendorong Inggris memberlakukan darurat pada 1948, sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya memiliki pemerintahan nasional yang mandiri dan mampu menjaga stabilitas keamanan secara efektif (Hall, 1987).

Semangat perjuangan masyarakat Melayu juga mendapat dorongan dari keberhasilan gerakan kemerdekaan di negara-negara Asia lainnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 dan kemerdekaan India pada 1947 menjadi sumber inspirasi yang amat kuat bagi kalangan elite politik Melayu bahwa kolonialisme sesungguhnya dapat diakhiri melalui perjuangan politik yang terorganisasi dengan baik. Pengaruh ini terlihat jelas dari kemunculan berbagai organisasi nasionalis seperti Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang menggunakan media massa sebagai sarana penyebaran gagasan kebangsaan dan kesadaran nasional (Andaya & Andaya, 2001).

Tahap baru perjuangan kemerdekaan dimulai ketika Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengambil alih kepemimpinan UMNO pada awal 1950-an. Beliau mengembangkan pendekatan politik moderat yang inovatif dengan membangun kerja sama lintas etnis melalui pembentukan Partai Perikatan yang menggabungkan UMNO, Malayan Chinese Association (MCA), dan Malayan Indian Congress (MIC). Strategi kolaboratif ini berhasil menciptakan fondasi stabilitas politik sekaligus meyakinkan pemerintah Inggris bahwa Tanah Melayu mampu membangun pemerintahan yang efektif, inklusif, dan damai bagi seluruh komunitas etnisnya (Ramlah Adam, 2004).

Pemilihan umum Persekutuan tahun 1955 menjadi tonggak historis yang sangat krusial dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Partai Perikatan berhasil meraih kemenangan besar dengan menguasai mayoritas kursi, membuktikan bahwa kerja sama multietnis merupakan model politik yang viable dan dapat diterima masyarakat luas. Kemenangan ini sekaligus mengangkat posisi Tunku Abdul Rahman ke panggung tertinggi sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah

Melayu dan memperkuat legitimasinya dalam perundingan dengan pihak Inggris (Hashimudin, Suwirta, & Awang, 2021).

Momentum diplomatik puncak terjadi pada Januari 1956 ketika delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri atas wakil Partai Perikatan dan Raja-raja Melayu bertolak ke London untuk berunding dengan pemerintah Inggris. Setelah melalui serangkaian perundingan intensif, Perjanjian London akhirnya ditandatangani pada 8 Februari 1956, menetapkan bahwa Persekutuan Tanah Melayu akan memperoleh kemerdekaan penuh pada 31 Agustus 1957. Berita gembira ini diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman di Padang Bandar Hilir, Melaka, pada 20 Februari 1956 di hadapan ribuan warga yang menyambut kabar tersebut dengan penuh kegembiraan dan antusiasme (Hashimudin et al., 2021).

Menjelang hari bersejarah kemerdekaan, pemerintah secara paralel mempersiapkan pembangunan negara modern di berbagai bidang. Dalam ranah ekonomi, Rancangan Malaya Pertama (1956–1960) diluncurkan dengan fokus utama pada pembangunan pedesaan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Melayu, termasuk melalui program pembukaan lahan oleh Federal Land Development Authority (FELDA). Di bidang pendidikan, Laporan Razak yang dihasilkan Jawatankuasa Pelajaran 1956 meletakkan dasar bagi sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada integrasi dan pembentukan identitas kebangsaan bersama. Sementara penyusunan Perlembagaan Persekutuan oleh Suruhanjaya Reid menjadi fondasi kokoh bagi sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan monarki konstitusional yang akan diterapkan setelah merdeka (Arkib Negara Malaysia, 2023).

Puncak dari seluruh perjuangan itu tiba pada 31 Agustus 1957, ketika Persekutuan Tanah Melayu secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Inggris. Upacara bersejarah ini berlangsung di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, dan dipimpin langsung oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dalam momentum yang menggetarkan jiwa tersebut, beliau mengumandangkan seruan "Merdeka" sebanyak tujuh kali—sebuah simbol yang bermakna mendalam atas berakhirnya era penjajahan kolonial sekaligus lahirnya bangsa yang berdaulat penuh. Peristiwa monumental ini menandai keberhasilan besar perjuangan politik dan diplomasi bangsa Melayu dalam meraih kemerdekaan secara damai dan bermartabat.Setelah kemerdekaan diraih, proses pembangunan negara berlanjut dengan gagasan yang lebih ambisius untuk memperluas wilayah persekutuan. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman mengusulkan pembentukan Federasi Malaysia yang akan mencakup Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Gagasan besar ini akhirnya berhasil diwujudkan meski tanpa keikutsertaan Brunei yang memilih jalur sendiri melalui pembentukan negara Malaysia pada 16 September 1963, yang kini diperingati sebagai Hari Malaysia setiap tahunnya (Andaya & Andaya, 2001).

Singapura

Kemerdekaan Singapura pada tahun 1965 tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme Inggris, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, serta konflik politik yang muncul dalam Federasi Malaysia. Sebelum menjadi negara merdeka, Singapura merupakan wilayah koloni Inggris yang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional sejak abad ke-19. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan dunia menjadikan Singapura sebagai pelabuhan penting di kawasan Asia Tenggara sekaligus pusat distribusi ekonomi regional. Perkembangan ekonomi tersebut membentuk masyarakat yang bersifat multietnis, terdiri atas Melayu, Cina, India, dan Eurasia dengan latar sosial-politik yang beragam (Turnbull, 1975).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan runtuhnya pendudukan Jepang, kesadaran politik masyarakat Singapura mulai meningkat. Melemahnya kekuasaan kolonial Inggris mendorong munculnya tuntutan pemerintahan sendiri di kalangan masyarakat lokal. Dalam proses dekolonisasi tersebut, Inggris secara bertahap memberikan ruang politik kepada elite lokal untuk terlibat dalam pemerintahan (Turnbull, 1975). Perubahan besar terjadi ketika People's Action Party (PAP) yang dipimpin Lee Kuan Yew memenangkan pemilu tahun 1959. Kemenangan tersebut menandai dimulainya pemerintahan sendiri di Singapura walaupun bidang pertahanan dan hubungan luar negeri masih berada di bawah pengawasan Inggris. Lee Kuan Yew menjelaskan bahwa pada masa awal pemerintahannya, Singapura menghadapi ancaman komunisme, ketegangan ideologis, serta persoalan sosial yang cukup serius (Yew, 2012a).

Dalam upaya memperkuat stabilitas politik dan memperluas basis ekonomi, Singapura kemudian bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963 bersama Malaya, Sabah, dan Sarawak. Penggabungan tersebut diharapkan mampu menciptakan pasar bersama dan memperkuat keamanan kawasan, terutama dalam menghadapi ancaman komunisme dan Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia (Turnbull, 1975). Akan tetapi, setelah integrasi berlangsung, hubungan antara pemerintah Singapura dan pemerintah pusat Malaysia mulai mengalami ketegangan akibat adanya perbedaan pandangan politik yang mendasar.

Pemerintah Singapura melalui PAP mengusung konsep "Malaysian Malaysia" yang menekankan persamaan hak seluruh warga negara tanpa membedakan latar etnis. Di sisi lain, elite politik Malaysia mempertahankan dominasi politik Melayu sebagai dasar utama sistem politik nasional. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan konflik politik antara PAP dan United Malays National Organisation (UMNO). Dalam memoirnya, Lee Kuan Yew menilai bahwa perbedaan konsep mengenai negara multiras menjadi salah satu penyebab utama memburuknya hubungan Singapura dengan pemerintah pusat Malaysia (Yew, 2012a).

Konflik politik semakin meningkat setelah pecahnya kerusuhan rasial tahun 1964 yang memperlihatkan rapuhnya hubungan antaretnis di dalam Federasi Malaysia. Peristiwa tersebut memperkuat kekhawatiran pemerintah Malaysia terhadap potensi gangguan stabilitas politik nasional akibat keberadaan Singapura. Selain persoalan politik dan etnis, ketegangan juga muncul di bidang ekonomi ketika pemerintah Malaysia mulai mengurangi ketergantungan perdagangan terhadap Singapura. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kebijakan Konfrontasi Indonesia yang memengaruhi stabilitas keamanan dan perdagangan kawasan Asia Tenggara.

Dalam *From Third World to First: The Singapore Story, 1965-2000*, Lee Kuan Yew menjelaskan bahwa setelah pemisahan dari Malaysia, Singapura berada dalam kondisi yang sangat rentan. Negara baru tersebut tidak memiliki sumber daya alam, kekuatan militer yang kuat, maupun jaminan keamanan regional. Selain itu, tingkat pengangguran meningkat dan kegiatan perdagangan mengalami perlambatan akibat terganggunya hubungan ekonomi dengan Malaysia dan Indonesia (Yew, 2012b). Situasi tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Singapura lahir dalam kondisi penuh ketidakpastian dan tantangan besar terhadap keberlangsungan negara.

Perbedaan ideologi politik, konflik rasial, dan pertentangan ekonomi akhirnya mendorong Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, mengambil keputusan untuk memisahkan Singapura dari Federasi Malaysia. Pada 9 Agustus 1965, Singapura secara resmi keluar dari Malaysia dan berdiri sebagai negara merdeka yang berdaulat. Dengan demikian, kemerdekaan Singapura bukan semata-mata hasil perjuangan anti-kolonial, melainkan juga akibat dari konflik politik internal dalam Federasi Malaysia yang tidak berhasil diselesaikan melalui kompromi politik.

Proses kemerdekaan Singapura berlangsung dengan cara yang berbeda dibandingkan banyak negara Asia Tenggara lainnya. Jika sebagian besar negara memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan melawan kekuasaan kolonial, Singapura justru menjadi negara merdeka melalui proses pemisahan politik dari Federasi Malaysia. Pada awalnya, Singapura memilih bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dan keamanan regional. Namun, hubungan politik antara pemerintah Singapura dan pemerintah pusat Malaysia terus mengalami ketegangan akibat perbedaan kepentingan dan ideologi politik.

Hal tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1965 ketika hubungan antara PAP dan UMNO semakin memburuk. Pemerintah Malaysia menganggap kebijakan politik PAP berpotensi mengancam dominasi politik Melayu dan memicu ketidakstabilan nasional. Dalam pidatonya di parlemen Malaysia, Tunku Abdul Rahman menyatakan bahwa pemerintah Malaysia hanya memiliki dua pilihan, yaitu mengambil tindakan keras terhadap Singapura atau memisahkan Singapura dari Federasi Malaysia. Pada akhirnya, pemerintah Malaysia memilih opsi pemisahan demi menghindari konflik politik dan rasial yang lebih luas (Yew, 2012a).

Pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew secara resmi mengumumkan kemerdekaan Singapura melalui siaran radio nasional. Dalam deklarasinya, Singapura dinyatakan sebagai negara yang berdaulat, demokratis, dan merdeka yang berlandaskan prinsip kebebasan dan keadilan sosial (Yew, 2012a). Pada hari yang sama, parlemen Malaysia mengesahkan Undang-Undang Pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia melalui proses legislatif yang berlangsung cepat. Setelah memperoleh persetujuan resmi dari Yang di-Pertuan Agong, pemisahan Singapura dinyatakan sah secara konstitusional.

Walaupun kemerdekaan telah diumumkan, Singapura menghadapi berbagai tantangan besar pada masa awal berdirinya negara tersebut. Dalam *From Third World to First*, Lee Kuan Yew menggambarkan bahwa pemerintah Singapura harus segera menghadapi persoalan keamanan nasional, kebutuhan pengakuan internasional, dan ancaman konflik rasial. Selain itu, Singapura belum memiliki angkatan bersenjata yang mandiri karena sebagian besar struktur militernya masih berada di bawah pengaruh Malaysia (Yew, 2012b).

Sebagai langkah awal, pemerintah Singapura berupaya memperoleh pengakuan diplomatik dari berbagai negara dan organisasi internasional. Lee Kuan Yew menunjuk Sinnathamby Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri untuk memperjuangkan pengakuan internasional serta keanggotaan Singapura dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di samping itu, pemerintah Singapura juga meminta bantuan India dan Mesir dalam membangun sistem pertahanan nasional dan melatih angkatan bersenjata baru (Yew, 2012a).

Di bidang pertahanan, pemerintah segera membentuk Ministry of Interior and Defence (MID) yang dipimpin oleh Goh Keng Swee untuk membangun kekuatan militer nasional dari awal. Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah khawatir terhadap kemungkinan ancaman keamanan baik dari luar maupun dari konflik internal. Lee Kuan Yew menjelaskan bahwa pada masa awal kemerdekaan, aparat keamanan dan militer Singapura masih didominasi personel Melayu yang sebelumnya berada di bawah struktur militer Malaysia sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas negara baru tersebut (Yew, 2012b).

Selain persoalan keamanan, tantangan besar juga muncul di bidang ekonomi. Setelah berpisah dari Malaysia, Singapura kehilangan sebagian besar wilayah pendukung ekonominya dan harus menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi. Menurut Lee Kuan Yew, Singapura perlu membangun model ekonomi baru agar mampu bertahan sebagai negara kecil tanpa sumber daya

alam (Yew, 2012b). Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan strategi industrialisasi, perdagangan internasional, investasi asing, dan pembangunan pelabuhan modern sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional.Dalam bidang sosial-politik, pemerintah Singapura juga berupaya menjaga persatuan masyarakat multietnis melalui kebijakan multirasial dan pemerintahan yang bersih. Pemerintah menyadari bahwa konflik etnis dapat menjadi ancaman serius bagi negara yang baru merdeka tersebut. Oleh sebab itu, stabilitas politik, penegakan hukum, dan integrasi nasional dijadikan prioritas utama pada masa awal kemerdekaan.

Dengan demikian, proses kemerdekaan Singapura merupakan proses politik yang kompleks dan penuh tantangan. Kemerdekaan tersebut lahir dari konflik internal dalam Federasi Malaysia, tetapi kemudian menjadi awal transformasi Singapura menjadi negara modern dengan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi yang tinggi. Kepemimpinan Lee Kuan Yew serta kemampuan pemerintah Singapura dalam mengelola krisis menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan negara baru tersebut di tengah situasi regional yang tidak stabil.

Thailand

Thailand tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kerajaan-kerajaan awal yang menjadi fondasi terbentuknya negara modern Thailand saat ini. Secara tradisional, asal-usul negara Thailand dikaitkan dengan berdirinya Kerajaan Sukhothai pada tahun 1238 yang dipandang sebagai kerajaan pertama bangsa Thai. Kerajaan ini kemudian berkembang dan digantikan oleh Kerajaan Ayutthaya yang berdiri pada pertengahan abad ke-14 dengan wilayah kekuasaan yang lebih luas serta pengaruh politik yang lebih kuat. Dalam perkembangannya, kebudayaan Thailand banyak dipengaruhi oleh peradaban India dan Tiongkok, terutama dalam bidang agama, sistem pemerintahan, seni, dan perdagangan. Hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa mulai berkembang sejak abad ke-16 melalui aktivitas diplomasi dan perdagangan internasional. Meskipun menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari negara-negara Barat, Thailand tetap mampu mempertahankan kedaulatannya sehingga menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah secara langsung oleh kekuatan kolonial Eropa.

Namun demikian, pengaruh Barat tetap membawa perubahan besar dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Thailand, terutama pada abad ke-19 melalui berbagai bentuk modernisasi dan penyesuaian kebijakan kerajaan. Thailand memiliki karakteristik historis yang berbeda dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya karena tidak pernah mengalami kolonialisme secara langsung. Oleh sebab itu, perkembangan sosial dan politik Thailand memiliki kekhasan tersendiri. Penduduk Thailand dikenal dengan sebutan orang Thai atau Siam, meskipun istilah “Thai” lebih populer karena memiliki makna “orang bebas” dalam bahasa Thai. Secara historis, asal-usul bangsa Thai dipercaya berasal dari kawasan Asia Tengah, khususnya wilayah Pegunungan Altai di Mongolia dan sekitarnya. D.G.E. Hall menjelaskan bahwa sekitar 7000 tahun yang lalu masyarakat Thai bermigrasi secara bertahap menuju wilayah selatan yang lebih subur hingga akhirnya menetap di kawasan Asia Tenggara. Proses migrasi tersebut kemudian melahirkan berbagai kerajaan yang menjadi cikal bakal peradaban Thailand modern.

Perkembangan sejarah Thailand modern dimulai dengan berdirinya Kerajaan Sukhothai pada tahun 1238. Kerajaan ini dianggap sebagai awal berkembangnya konsep monarki dalam sejarah Thailand. Kerajaan Sukhothai dipimpin oleh delapan raja selama periode 1238–1438 dan menerapkan sistem pemerintahan paternalistik yang menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan absolut. Masa kejayaan Kerajaan Sukhothai terjadi pada pemerintahan Raja Ramkhamhaeng yang dikenal berhasil memajukan perdagangan, seni, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahannya pula diciptakan aksara Thai pertama pada tahun 1283 yang menjadi tonggak

penting dalam perkembangan identitas budaya Thailand. Pada tahun 1437, Kerajaan Sukhothai kemudian bergabung dengan Kerajaan Ayutthaya dan menyerahkan kekuasaan politiknya kepada kerajaan tersebut.

Kerajaan Ayutthaya yang berdiri pada tahun 1350 berkembang menjadi kerajaan besar yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga menduduki Kerajaan Angkor. Secara administratif, Ayutthaya menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dengan pembagian yang jelas antara urusan sipil dan militer. Letaknya yang strategis di lembah Sungai Chao Phraya menjadikan Ayutthaya berkembang sebagai pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Tengah, Asia Timur, serta kawasan Melayu dan Nusantara. Pada masa pemerintahan Raja Narai (1656–1688), hubungan diplomatik dan perdagangan dengan bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, Tiongkok, dan Perancis berkembang sangat pesat. Hubungan dekat dengan Perancis bahkan dimanfaatkan untuk mengimbangi pengaruh Belanda di kawasan tersebut. Akan tetapi, konflik internal yang terjadi setelah wafatnya Raja Narai menyebabkan Kerajaan Ayutthaya mengalami kemunduran dan akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Burma pada tahun 1767 pada masa pemerintahan Raja Ekkathat.

Setelah runtuhnya Ayutthaya, Raja Taksin mendirikan Kerajaan Thonburi pada tahun 1767 sebagai pusat perlawanan terhadap Burma. Kerajaan ini hanya bertahan selama sekitar lima belas tahun sebelum digantikan oleh Kerajaan Rattanakosin yang didirikan oleh Raja Phra Putthayotfa Chulalok atau Raja Rama I pada tahun 1782. Raja Rama I memindahkan pusat pemerintahan dari Thonburi ke Bangkok yang kemudian menjadi ibu kota Thailand hingga saat ini. Berdirinya Kerajaan Rattanakosin sekaligus menandai lahirnya Dinasti Chakri yang masih berkuasa di Thailand sampai sekarang. Pemerintahan raja-raja Dinasti Chakri, terutama Raja Rama III dan Raja Rama IV, membawa Thailand menuju perkembangan ekonomi dan hubungan internasional yang lebih luas. Raja Rama IV atau Raja Mongkut dikenal sebagai pemimpin yang mulai membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat sebagai strategi untuk menghindari ancaman kolonialisme seperti yang dialami Burma dan Indochina.

Menurut Asep dkk (2024:128-129). Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil mempertahankan kemerdekaannya ketika negara-negara lain di kawasan tersebut berada di bawah kekuasaan kolonial Barat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan kerajaan Siam dalam menjalankan strategi politik, diplomasi, dan modernisasi negara secara bertahap. Pada abad ke-19, Asia Tenggara menjadi arena persaingan imperialisme Barat, khususnya antara Inggris dan Prancis. Dalam konteks tersebut, Thailand berada pada posisi yang sangat strategis karena diapit oleh wilayah kolonial Inggris di Burma dan Malaya serta wilayah kolonial Prancis di Indochina. Situasi geopolitik tersebut menempatkan Thailand dalam ancaman besar kolonialisme Barat.

Berbeda dengan negara-negara lain yang menghadapi invasi militer secara langsung, tekanan kolonial terhadap Thailand lebih banyak diwujudkan melalui diplomasi dan pengaruh ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Siam berupaya melakukan reformasi internal dengan menyesuaikan sistem pemerintahan dan administrasi negara sesuai dengan standar modern Barat. Modernisasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Siam merupakan negara berdaulat dan memiliki kemampuan untuk berkembang sejajar dengan negara-negara Eropa.

Menurut Asep dkk(2024:135),Upaya modernisasi mulai berkembang secara signifikan pada masa pemerintahan Raja Mongkut atau Raja Rama IV. Raja Mongkut dikenal memiliki pandangan yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Barat dan aktif menjalin

hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa.Pada masa pemerintahannya, pendidikan modern mulai diperkenalkan, penggunaan bahasa asing mulai dikembangkan, dan akses bagi misionaris serta tenaga pendidik Barat mulai dibuka. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi politik kerajaan Siam untuk menghindari campur tangan kolonial asing sekaligus memperlihatkan bahwa Siam merupakan negara yang modern dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Modernisasi yang dilakukan Raja Mongkut kemudian dilanjutkan secara lebih sistematis oleh Raja Chulalongkorn atau Raja Rama V pada periode 1868–1910. Pada masa pemerintahannya, Thailand mengalami reformasi besar-besaran di berbagai bidang, termasuk administrasi pemerintahan, hukum, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.Menurut Sulaiman(2025:25-28), Raja Chulalongkorn membentuk sistem birokrasi modern dengan kementerian-kementerian fungsional guna meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dalam bidang hukum, Thailand mulai mengadopsi sistem hukum Barat untuk meningkatkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara. Selain itu, Raja Chulalongkorn juga melakukan penghapusan sistem perbudakan secara bertahap, membangun sarana transportasi dan komunikasi, serta mendirikan lembaga pendidikan modern dan mengirim pelajar Thailand untuk belajar di luar negeri.

Selain reformasi internal, Raja Chulalongkorn juga menjalankan strategi diplomasi internasional dengan menjalin hubungan baik dengan Inggris dan Prancis serta melakukan kunjungan resmi ke berbagai negara Eropa. Strategi tersebut bertujuan membangun citra Siam sebagai negara modern dan berdaulat sehingga dapat mengurangi peluang negara-negara Barat untuk melakukan kolonialisasi. Dalam konteks geopolitik Asia Tenggara, Thailand juga berfungsi sebagai buffer state atau negara penyangga antara wilayah kolonial Inggris dan Prancis. Oleh sebab itu, kedua negara kolonial tersebut cenderung mempertahankan keberadaan Siam sebagai negara merdeka demi menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan.

Meskipun dalam beberapa kesempatan Thailand harus menyerahkan sebagian wilayah perbatasannya kepada Inggris dan Prancis, kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah politik yang realistis demi mempertahankan kedaulatan negara secara keseluruhan. Reformasi dan modernisasi yang dilakukan pada masa Raja Chulalongkorn membawa dampak besar terhadap perkembangan Thailand menjadi negara modern. Menurut Sulaiman (2025:34),Modernisasi tersebut tidak hanya memperkuat sistem pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas nasional Thailand serta meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tekanan kolonialisme Barat. Dengan demikian, Thailand berhasil mempertahankan kemerdekaannya di tengah meluasnya kolonialisme di kawasan Asia Tenggara.

Invasi Jepang ke Thailand pada masa Perang Dunia II berlangsung pada 8 Desember 1941 dan merupakan bagian dari strategi ekspansi militer Jepang di kawasan Asia Tenggara. Jepang berupaya menguasai berbagai wilayah strategis di kawasan tersebut guna memperoleh sumber daya alam sekaligus memperluas pengaruh politik dan militernya. Dalam konteks ini, Thailand memiliki posisi yang sangat penting karena terletak pada jalur strategis menuju Malaya dan Burma yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Oleh sebab itu, Thailand dijadikan sebagai salah satu wilayah utama untuk mendukung operasi militer Jepang di Asia Tenggara.

Jepang mulai melancarkan operasi militernya di Asia Tenggara dengan melakukan pendaratan pasukan di wilayah Thailand dan Malaya pada 8 Desember 1941. Ia menjelaskan bahwa “pasukan Angkatan Darat Jepang yang sudah menunggu di Indocina Selatan menyebrang ke teluk Siam dan mendarat di wilayah Thailand dan Malaya” (Rifa’i, 2025:1186). Peristiwa invasi

tersebut berlangsung hampir bersamaan dengan serangan Jepang terhadap Pearl Harbor yang ditujukan kepada Amerika Serikat.

Pendaratan pasukan Jepang di Thailand berlangsung dalam waktu yang relatif singkat karena pemerintah Thailand tidak memberikan perlawanan yang signifikan terhadap Jepang. Dalam artikelnya, Rifa'i menyatakan bahwa tentara Jepang "mendarat di Sinkra dan Patani di Thailand tanpa adanya perlawanan" karena Thailand kemudian memilih bergabung dengan Jepang dalam Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya (Rifa'i, 2025:1187). Kebijakan Thailand untuk menjalin kerja sama dengan Jepang didasarkan pada pertimbangan politik dan militer, terutama untuk menghindari kerusakan dan kehancuran yang lebih besar akibat peperangan. Pasca invasi tersebut, Thailand memberikan izin kepada Jepang untuk memanfaatkan wilayahnya sebagai jalur pergerakan militer menuju Malaya dan Burma. Kerja sama ini memberikan keuntungan strategis bagi Jepang dalam melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Inggris di Asia Tenggara. Selain itu, hubungan antara Thailand dan Jepang semakin erat melalui berbagai bentuk kerja sama politik dan militer yang berlangsung selama masa perang.

Invasi Jepang ke Thailand membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Thailand tetap mampu mempertahankan statusnya sebagai negara yang tidak dijajah secara langsung, negara tersebut berada di bawah pengaruh kuat Jepang selama Perang Dunia II berlangsung. Setelah Jepang mengalami kekalahan pada tahun 1945, Thailand kembali memperoleh pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurut Aini Shalihah dkk (2025: 55-58) Thailand merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang menempatkan raja sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Dalam sistem ini, kedudukan raja bersifat turun-temurun berdasarkan garis keturunan kerajaan, sementara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Thailand adalah sistem parlementer, di mana pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Lembaga legislatif Thailand dikenal dengan nama Majelis Nasional atau Rathasapha yang menerapkan sistem dua kamar (bicameral). Majelis Nasional terdiri atas Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) dan Senat (Wuthisapha). Dewan Perwakilan beranggotakan sekitar 480 orang yang memiliki masa jabatan selama empat tahun, sedangkan Senat terdiri atas sekitar 150 anggota dengan masa jabatan selama enam tahun.12 Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyusunan kebijakan negara.

Bentuk negara Thailand adalah negara kesatuan yang bersifat tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut ditegaskan dalam Interim Constitution of the Kingdom of Thailand Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Thailand is a Kingdom, one and indivisible". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Thailand merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang bercorak sentralistis. Dalam praktik ketatanegaraan, hampir seluruh urusan pemerintahan dan administrasi negara dikendalikan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintahan daerah di Thailand lebih bersifat administratif dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.Kepala negara Thailand tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum ataupun melalui lembaga tertentu, melainkan berdasarkan sistem pewarisan takhta secara turun-temurun. Raja berkedudukan sebagai simbol persatuan bangsa dan negara, bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan secara langsung. Oleh karena itu, Thailand dikategorikan sebagai negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional.14 Dalam sistem ini, raja

memiliki fungsi simbolik sekaligus moral dalam kehidupan bernegara, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet dan perdana menteri.

Kekuasaan pemerintahan secara riil berada di tangan dewan menteri yang dibentuk berdasarkan rekomendasi perdana menteri dan secara resmi diangkat oleh raja. Perdana menteri sendiri diangkat oleh raja berdasarkan dukungan mayoritas partai politik yang menguasai parlemen. Dengan demikian, keberlangsungan pemerintahan sangat bergantung pada dukungan parlemen terhadap kabinet. Sistem ini mencerminkan ciri utama sistem parlementer, yaitu adanya hubungan pertanggungjawaban politik kabinet kepada parlemen.

Dalam sejarah ketatanegaraan modern, sistem parlementer berkembang sebagai kelanjutan dari bentuk monarki konstitusional yang membatasi kekuasaan raja melalui konstitusi. Oleh sebab itu, dalam sistem parlementer di Thailand, raja hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet. Kabinet terdiri atas perdana menteri dan para menteri yang secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet kehilangan kepercayaan dari parlemen, maka kabinet wajib mengundurkan diri dan mengembalikan mandat pemerintahan kepada kepala negara. Dalam konteks tersebut dikenal prinsip ketatanegaraan Thailand yang menyatakan bahwa “The King can do no wrong”, yang berarti bahwa raja tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahan karena tanggung jawab politik sepenuhnya berada pada kabinet.

Thailand juga dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis dengan raja sebagai simbol moral dan pemersatu bangsa. Dalam beberapa peristiwa krisis politik, kedudukan raja sering dimanfaatkan sebagai mediator untuk menjaga stabilitas nasional. Raja Thailand memperoleh penghormatan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat dan secara konstitusional tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, raja juga dipandang sebagai pelindung agama Buddha sekaligus pemimpin tertinggi angkatan bersenjata Thailand. Kekuasaan legislatif di Thailand berada di tangan Majelis Nasional yang terdiri atas Dewan Perwakilan dan Senat. Dalam beberapa perkembangan ketatanegaraan, jumlah anggota Dewan Perwakilan mencapai 500 orang, sedangkan jumlah anggota Senat mencapai 200 orang. Seluruh anggota kedua lembaga tersebut dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan adalah empat tahun, sementara anggota Senat menjabat selama enam tahun. Majelis Nasional dapat melaksanakan sidang bersama maupun sidang terpisah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam struktur parlemen, Ketua Dewan Perwakilan juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional, sedangkan Ketua Senat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Nasional.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan dilakukan melalui sistem pemilihan langsung dengan asas pemungutan suara rahasia. Sebagian anggota dipilih melalui sistem distrik atau konstituensi, sementara sebagian lainnya dipilih melalui sistem proporsional. Mekanisme dan prosedur pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam hukum organik mengenai pemilihan anggota parlemen dan proses pengangkatan senator.Sementara itu, kekuasaan yudikatif di Thailand berada di bawah lembaga yang dikenal sebagai Dewan Penasihat (Privy Council). Lembaga ini dipilih dan diangkat langsung oleh raja. Raja memiliki kewenangan untuk menunjuk Presiden Dewan Penasihat beserta anggota-anggotanya dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan konstitusi. Dewan Penasihat memiliki fungsi utama memberikan pertimbangan dan nasihat kepada raja mengenai berbagai persoalan kenegaraan.

Filiphina

Kemerdekaan Filipina berkaitan erat dengan munculnya ketidakpuasan rakyat terhadap sistem kolonial Spanyol yang berlangsung sejak abad ke-16. Selama lebih dari tiga abad, Spanyol membangun pemerintahan kolonial yang berpusat di Manila dan menjadikan Filipina sebagai wilayah strategis untuk kepentingan perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia. Dalam praktiknya, kolonialisme Spanyol melahirkan ketimpangan sosial yang besar karena kekuasaan politik, ekonomi, dan agama dikuasai oleh elite kolonial dan kelompok gereja (Constantino,1975). Rakyat Filipina mengalami berbagai bentuk penindasan, seperti pajak yang tinggi, kerja paksa, serta diskriminasi sosial dalam pemerintahan kolonial. Selain itu, sebagian besar rakyat tidak memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan maupun jabatan pemerintahan. Dominasi gereja Katolik juga memperkuat kekuasaan kolonial karena lembaga keagamaan dijadikan alat legitimasi pemerintahan Spanyol. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan yang semakin meluas di kalangan masyarakat Filipina.

Pada abad ke-19 mulai muncul kelompok terpelajar Filipina yang dikenal sebagai ilustrado. Kelompok ini memperoleh pendidikan Barat dan mulai mengenal gagasan liberalisme, nasionalisme, serta hak menentukan nasib sendiri. Kaum ilustrado berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional karena mereka mulai mengkritik sistem kolonial yang dianggap tidak adil terhadap rakyat Filipina. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan nasionalisme Filipina adalah José Rizal. Melalui novel Noli Me Tangere dan El Filibusterismo, Rizal mengkritik penyalahgunaan kekuasaan pemerintah kolonial dan gereja Katolik di Filipina. Pemikiran Rizal mendorong tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan rakyat Filipina, terutama mengenai pentingnya persamaan hak dan kebebasan nasional.

Selain gerakan intelektual, berkembang pula gerakan yang lebih radikal. Pada tahun 1892,Andrés Bonifacio mendirikan organisasi Katipunan (Kataastaasan, Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan). Organisasi ini bertujuan membebaskan Filipina dari penjajahan Spanyol melalui perjuangan bersenjata. Berdirinya Katipunan menunjukkan perubahan arah perjuangan nasional Filipina, dari gerakan reformasi menuju gerakan revolusioner untuk memperoleh kemerdekaan penuh (Constantino , 1975).Selain faktor internal, situasi internasional juga memengaruhi lahirnya perjuangan kemerdekaan Filipina. Pada akhir abad ke-19, kekuasaan Spanyol mulai melemah, terutama setelah terjadinya Perang Spanyol-Amerika tahun 1898. Kekalahan armada Spanyol dalam Pertempuran Teluk Manila memperlihatkan kemunduran kekuatan kolonial Spanyol di Filipina (Fiske, 1898). Kondisi tersebut membuka peluang bagi kaum nasionalis Filipina untuk memperkuat perjuangan menuju kemerdekaan.

Dengan demikian, latar belakang kemerdekaan Filipina dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu penindasan kolonial Spanyol, ketimpangan sosial dan ekonomi, berkembangnya nasionalisme modern, munculnya kaum ilustrado, serta melemahnya kekuasaan Spanyol pada akhir abad ke-19. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar lahirnya gerakan nasional Filipina yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.Proses kemerdekaan Filipina berlangsung melalui perjuangan revolusi yang panjang dan melibatkan konflik dengan dua kekuatan kolonial, yaitu Spanyol dan Amerika Serikat. Perjuangan ini berkembang dari gerakan nasionalisme menjadi revolusi bersenjata yang bertujuan membentuk negara Filipina Merdeka.Perjuangan dimulai melalui gerakan reformasi yang dipelopori kaum ilustrado pada akhir abad ke-19. Mereka menuntut persamaan hak dan reformasi pemerintahan kolonial Spanyol. Namun, pemerintah kolonial menolak tuntutan tersebut dan tetap menjalankan kebijakan represif terhadap rakyat Filipina. Kegagalan gerakan reformasi mendorong sebagian nasionalis Filipina beralih pada

perjuangan revolusioner (Constantino,1975).Perubahan tersebut terlihat dari berdirinya organisasi Katipunan pada tahun 1892 oleh Andrés Bonifacio. Organisasi ini berkembang secara rahasia dan berhasil menghimpun dukungan luas dari rakyat Filipina. Pada tahun 1896, keberadaan Katipunan diketahui oleh pemerintah kolonial Spanyol sehingga memicu pecahnya Revolusi Filipina. Revolusi ini menjadi awal perlawanan terbuka rakyat Filipina terhadap kekuasaan Spanyol.

Dalam perkembangan revolusi, Bonifacio memimpin perjuangan rakyat melawan pasukan kolonial. Akan tetapi, konflik internal di kalangan revolusioner menyebabkan kepemimpinan perjuangan beralih kepada Emilio Aguinaldo. Di bawah kepemimpinan Aguinaldo, pasukan revolusioner Filipina berhasil menguasai beberapa wilayah penting dan memperlemah kekuasaan Spanyol. Situasi perjuangan Filipina semakin berubah ketika terjadi Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898. Dalam perang tersebut, armada Amerika Serikat yang dipimpin George Dewey menghancurkan armada Spanyol dalam Pertempuran Teluk Manila. Kekalahan tersebut menyebabkan posisi Spanyol di Filipina semakin lemah dan memberikan kesempatan bagi kaum revolusioner Filipina untuk memperluas perjuangan kemerdekaan (Fiske, 1898).

Pada tanggal 12 Juni 1898, Emilio Aguinaldo memproklamasikan kemerdekaan Filipina di Kawit, Cavite. Peristiwa ini menandai berdirinya Republik Filipina dan menjadi simbol lahirnya bangsa Filipina yang merdeka dari kekuasaan Spanyol. Dalam upacara tersebut, bendera Filipina dikibarkan dan lagu kebangsaan Filipina diperdengarkan sebagai lambang kedaulatan nasional.Meskipun demikian, kemerdekaan Filipina belum sepenuhnya diakui secara internasional. Setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika, Filipina justru diserahkan kepada Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris tahun 1898. Menurut Constantino (1975), peristiwa ini menunjukkan munculnya imperialisme baru di Filipina setelah berakhirnya kolonialisme Spanyol.

Penolakan rakyat Filipina terhadap kekuasaan Amerika Serikat memicu terjadinya Perang Filipina-Amerika pada tahun 1899. Rakyat Filipina melakukan berbagai bentuk perlawanan di bawah kepemimpinan Aguinaldo, tetapi kekuatan militer Amerika Serikat yang lebih modern menyebabkan perjuangan tersebut mengalami kekalahan. Walaupun demikian, semangat nasionalisme Filipina tetap berkembang selama masa kekuasaan Amerika Serikat.Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh pada tanggal 4 Juli 1946 setelah Amerika Serikat mengakui kedaulatan Filipina. Kemerdekaan tersebut menandai berakhirnya penjajahan asing dan lahirnya Filipina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Pembentukan Asean

Pembentukan Association of Southeast Asian Nations dilatarbelakangi oleh kondisi kawasan Asia Tenggara yang pada masa setelah Perang Dunia II masih mengalami berbagai permasalahan politik dan keamanan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang baru memperoleh kemerdekaan merasa perlu membangun kerja sama regional untuk menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat hubungan antarnegara. Kesadaran tersebut muncul karena setiap negara tidak mampu menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan keamanan secara sendiri, sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjadi wadah kerja sama regional (Mangku, 2010).

Sebelum ASEAN berdiri, sebenarnya telah ada organisasi regional lain seperti ASA (Association of Southeast Asia) yang dibentuk oleh Thailand, Malaysia, dan Filipina pada tahun 1961. Selain itu, terdapat pula organisasi MAPHILINDO yang melibatkan Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Namun, kedua organisasi tersebut tidak mampu bertahan lama akibat adanya perbedaan kepentingan politik dan hubungan yang kurang harmonis antarnegara anggota. Walaupun

mengalami kegagalan, keberadaan organisasi-organisasi tersebut menjadi dasar penting bagi terbentuknya kerja sama regional yang lebih kuat di Asia Tenggara (Mangku, 2010).

ASEAN kemudian resmi didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan sosial dan budaya, serta menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Selain itu, ASEAN juga bertujuan mempererat kerja sama antarnegara anggota melalui semangat persahabatan, persamaan kedudukan, dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara (Luhulima dkk., 2008).Dalam perkembangannya, ASEAN terus mengalami kemajuan dengan memperluas kerja sama di berbagai bidang, seperti politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. ASEAN juga membentuk Komunitas ASEAN yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Pembentukan komunitas tersebut bertujuan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Hingga saat ini, ASEAN tetap berpegang pada prinsip musyawarah, konsensus, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta penyelesaian konflik secara damai sebagai dasar utama dalam menjalankan kerja sama regional.

KESIMPULAN

Proses kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara memiliki latar belakang dan jalan perjuangan yang berbeda-beda, tetapi semuanya dipengaruhi oleh kolonialisme, nasionalisme, dan situasi Perang Dunia II. Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda dan Jepang hingga memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Malaysia meraih kemerdekaan melalui perjuangan politik dan diplomasi yang dipimpin UMNO hingga resmi merdeka pada 31 Agustus 1957. Singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965 setelah memisahkan diri dari Federasi Malaysia akibat konflik politik dan perbedaan ideologi. Thailand memiliki keunikan karena tidak pernah dijajah secara langsung oleh bangsa Barat, tetapi tetap melakukan modernisasi dan diplomasi untuk mempertahankan kedaulatannya. Filipina memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan panjang melawan Spanyol dan Amerika Serikat hingga akhirnya merdeka penuh pada tahun 1946. Dari pengalaman tersebut, negara-negara Asia Tenggara kemudian menyadari pentingnya kerja sama regional sehingga membentuk ASEAN pada tahun 1967 untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bersama di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Barbara Watson, dan Leonard Y. Andaya. A History of Malaysia. London: Macmillan Education, 2001.

Arkib Negara Malaysia. Malaysia Tanah Airku. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 2023.

Constantino, R., & Constantino, L. R. (1975). A History of the Philippines. NYU Press.

Febrianti, B. (2024). Peristiwa Rengasdengklok menjadi pembuka kemerdekaan Indonesia. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, 4*(2).

Fiske, A. K. (1898). The Story of the Philippines.

Halimi, Ahmad Jelani. Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2008.

Hall, D.G.E. Sejarah Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Hashimudin, N., A. Suwirta, dan M. M. Awang. "Kronologi Perjuangan Kemerdekaan di Indonesia dan Malaysia: Menurut Buku Teks Sejarah SMA Kelas 11 dan Sekolah Menengah Tingkatan 4." SUSURGALUR 9, no. 1 (2021): 55-74.

Hidayat, A. A., dkk. (2024). Masa kolonialisme kawasan Asia Tenggara. Sharia: *Jurnal Kajian Islam*, 1(2): 126–138.

Kartodirdjo, S. (2008). *Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia*. Balai Pustaka.

Khoo Kay Kim. "Konflik Perkauman: Satu Perspektif Sejarah." Dewan Masyarakat, 9 September 1991.

Ramlah Adam. Biografi Politik Tunku Abdul Rahman Putra. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

Rifa'I,Muhammad Willdan Zainur .(2025).“The Last Wall in the Spice Land: The Dutch East Indies Facing Japanese Attack 1942.” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 9(4): 1186–1195.

Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi politik bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2*(1).

Rut, S., Zalukhu, D., Nazwa, D., & Sinaga, R. (2024). Pendudukan Jepang di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4*(6), 9371–9382.

Shalihah,Aini.dkk.(2025). REKONSTRUKSI HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM HISTORISASI KONSTITUSI THAILAND.*Journal of Law and Administrative Science (JLAS)*.3(2),55-58

Simandjuntak, B. Malayan Federalism 1945-1963: A Study of Federal Problems in a Plural Society. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969.

Sulaiman, H. (2025). Kebijakan modernisasi Raja Chulalongkorn (Rama V) dan dampaknya bagi negara Thailand. *Sajaratun: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 10(1): 27–36.

Turnbull, C. M. (1975). A history of modern Singapore, 1819-1975. Oxford university Press.

Yew, L. K. (2012). From third world to first: The Singapore story, 1965-2000. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.

Yew, L. K. (2012). The singapore story: memoirs of Lee Kuan Yew (Vol. 1). Marshall Cavendish Education Pte Ltd.

Zara, M. Y. (2024). “Mabuhay ang Filipina!”: The Independence of the Philippines in the Imaginations of Indonesian Freedom Fighters in the Context of the Dutch-Indonesian War. Advances in Southeast Asian Studies, 17(2), 171-186.